

Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

Yoni Muslimin¹, Hudaidah²

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Palembang ^{1,2}

*E-mail: yonimuslimin3@gmail.com

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait dengan topik yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keadaan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang dengan berbagai kebijakan sebagai langkah kemenangan dalam pertempuran.

Keywords: Pendidikan, periode Jepang



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licenses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Belanda mulai angkat kaki dari Indonesia setelah menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Sejak saat itulah penjajahan Jepang di Indonesia dimulai. Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Dengan konsep "Hakko Ichiu" (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia", Jepang menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Demi kepentingannya, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia sehingga sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi oleh keinginannya untuk memenangkan peperangan Pasifik (Syaharuddin, 2019).

Dalam kebijakan pendidikannya, Jepang melarang sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda ataupun berbahasa Eropa lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghapus pengaruh barat di Indonesia. Sekolah-sekolah swasta yang ada saat itu diperbolehkan beroperasi oleh Jepang asalkan telah mengajukan ulang surat izin kepada Jepang untuk tetap bisa beroperasi (Sedana, 2015).

Dualisme pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Belanda dihapuskan pada kebijakan pendidikan Jepang saat itu. Hanya ada satu jenis sekolah rendah yang diadakan pada masa itu dan bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang golongan, yaitu Sekolah Rakyat atau "Kokumin Gakko" yang diadakan dengan jenjang waktu selama 6 tahun. Sekolah-sekolah desa tetap dibuka tetapi dengan nama yang diganti menjadi Sekolah Pertama (Abbas, 2018).

Pemerintahan Jepang sebenarnya sangat kurang dalam memperhatikan mutu pendidikannya karena tujuan pendidikan mereka ialah untuk menyediakan tenaga Cuma-Cuma (Rhomusa) dan prajurit-prajurit untuk membantu kepentingan Jepang dalam memenangkan peperangan Pasifik. Karena hal itu membuat sekolah-sekolah menekankan pendidikan militer (Amelia, 2020). Murid-murid diharuskan melakukan latihan fisik dan latihan kemiliteran. Jepang bertujuan membentuk barisan-barisan propaganda yang bertugas menanamkan ideologi baru yang akan menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Hal ini membuat upaya Jepang dalam pendidikan berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan (Apri Nuryanto, 2020).

Akibat dari hasil yang kurang memuaskan, sistem pendidikan harus mengalami perubahan yang mendasar setelah Jepang menyerah atau tepat saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan ini

menyesuaikan dengan landasan idiel Pancasila. Tujuan pendidikan diubah dan dirumuskan untuk mendidik rakyat menjadi warga negara yang sejati dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan negara dan masyarakat (Moehadi, 1997).

Metode

Metode yang dilakukan dalam pembuatan artikel ini adalah dengan menggunakan studi pustaka/studi literatur. Materi dalam pembuatan artikel ini sudah ditentukan oleh Ibu/Bapak dosen mata kuliah "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan", sedangkan sistematika mulai dari pembuatan judul, abstrak, pendahuluan, dan pembahasan menggunakan literatur baca mulai dari e-book, jurnal, artikel, laporan penelitian, makalah, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya. Pembuatan artikel ini menggunakan sistem pengumpulan informasi yang terpercaya dengan topik bahasan yang telah ditentukan (Daliman, 2012). Metode studi pustaka/studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur baca yang berkaitan dengan topik bahasan pada artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Pada 18 Maret 1942 Belanda menandatangani kapitulasi di Kalijati, Subang, Jawa Barat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Stakenborg dan Panglima Militer Ter Porten, yang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Tentara Pendudukan Jepang. Dengan berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu Periode Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang (Fadli, M. R., & Kumalasari, 2019).

Sejak tahun 1940 Jepang telah berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Barat Raya. Semangat Jepang untuk menanamkan pengaruh dan wilayah sebagai bentuk rencana membentuk Asia Timur Raya, Jepang mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara-negara sekitarnya. Adanya konsep "Hakko Ichiu" atau Kemakmuran Bersama Asia Raya dan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia", Jepang menjadikan Indonesia sebagai potensi yang bisa membantu ambisi besarnya. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas kepentingan ini. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang bisa dikatakan sangat dipengaruhi oleh motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik (Permadi, E. G., & Purwaningsih, 2015).

Jepang dalam menguasai bidang pendidikan di Indonesia pada awalnya menerapkan kebijakan sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda ataupun berebahasa Eropa lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghapus pengaruh barat di Indonesia. Sekolah-sekolah pribumi diperbolehkan untuk dibuka dan sekolah-sekolah swasta yang ada saat itu diperbolehkan beroperasi oleh Jepang asalkan telah mengajukan ulang surat izin kepada Jepang untuk tetap bisa beroperasi. Jepang tahu bahwa pendidikan bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengontrol masyarakat. (Purwanti, 2018).

Sekolah yang didirikan pada masa pendudukan Jepang awalnya ialah Sekolah rakyat atau "Kokumin Gakko" sebagai pendidikan dasar dengan jenjang waktu pendidikan selama enam tahun. Lalu sebagai sekolah lanjutan didirikan Sekolah Menengah Pertama atau "Shoto Chu Gakko" dengan jenjang waktu pendidikan selama tiga tahun dan Sekolah Menengah Atas atau "Koto Chu Gakko" dengan jenjang waktu pendidikan selama tiga tahun. Selain itu didirikan juga oleh Jepang Pendidikan Kejuruan dalam bidang pendidikan, pertukangan, pelayaran, pertanian, dan teknik. Dari semua jenis pendidikan yang didirikan, Sekolah Rakyat lah yang dimanfaatkan oleh Jepang untuk mengatur masyarakat yang terlihat dari banyaknya Sekolah Rakyat yang didirikan (Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, 2018).

Untuk perguruan tinggi, Jepang hampir menutup semua perguruan tinggi bekas Belanda, yang tersisa ialah hanya Sekolah Kedokteran Tinggi atau "Ika Dai Gakko" di Jakarta yang dibuka kembali tahun 1943, lalu Sekolah Teknik Tinggi atau "Kogyo Dai Gakko" di Bandung, Sekolah Tinggi Pangreh Praja atau "Kenkoku Gakuin" (diganti MOSVIA) di Jakarta, Sekolah Ahli Obat atau "Yaku Gakko" di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi atau "Shika Gakko" di Surabaya, dan Sekolah kedokteran Hewan di Bogor (Saminto, 2019).

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang terutama Pendidikan Dasar sangat berbeda dengan Pendidikan Dasar pada masa pendudukan Belanda. Pada masa pendudukan Belanda terdapat tingkatan-tingkatan dalam Pendidikan Dasar yang tidak semua orang rasakan. Tingkatan pembeda atau dualisme ini tidak diberlakukan pada masa pendudukan Jepang. Hanya ada satu Pendidikan Dasar yang bisa dirasakan oleh semua golongan tanpa ada lagi diferensiasi karena hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama (Syarif, 2019).

Bahasa yang digunakan sebagai pengantar pembelajaran juga ikut diatur dalam kebijakan pendidikan Jepang yang ingin menghapus pengaruh barat di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sekolah secara resmi. Namun bahasa Jepang tetap menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Hal ini menjadi kesulitan terutama terkait buku-buku pelajaran. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (Bunkyo Kyoku) atau para guru menerjemahkan dan menyusun sendiri dari buku-buku berbahasa Belanda (Sri Wahyuni, 2018).

Pembelajaran yang diberikan pada masa itu sangatlah dipengaruhi oleh tujuan awal Jepang yaitu memenangkan pertempuran Pasifik. Kegiatan di sekolah banyak diisi dengan latihan jasmani atau kemiliteran bahkan kegiatan-kegiatan yang membantu mereka dalam keperluan perang seperti kerja bakti (*kinro hoshi*), membersihkan bengkel dan asrama, dan juga kegiatan pertanian. Selain latihan militer, para murid juga diberikan penanaman moral Jepang seperti pelaksanaan apel pagi dan melakukan senam (*taiso*), pemberian hormat kepada kaisar Jepang (*Saikere*), menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan pengucapan sumpah setia kepada kaisar Jepang (Aiko, 2015)

Dengan adanya latihan militer dan penanaman moral Jepang, diharapkan bisa menjadikan para peserta didik memiliki jiwa kemiliteran dan membantu kemenangan perang Asia Timur Raya. Dari model dan bentuk pembelajaran inilah jelas bahwa Jepang sangat ingin menjepangkan para peserta didik (Sedana, 2015)

Pada awal pendudukan Jepang masalah yang dialami dalam bidang pendidikan ialah kelangkaan guru. Jepang kesulitan dalam mencari guru yang berkualitas karena pada masa pendudukan Belanda tidak terlalu memperhatikan kualitas guru dan adanya peralihan bahasa pengantar menjadi faktor kelangkaan guru yang bisa mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Guru pada masa pendudukan Jepang lebih dihargai bahkan mendapat kenaikan upah sesuai tempat mereka mengajar. Mereka juga terkadang dipekerjakan di kantor propaganda dan menjadi pembicara di berbagai kursus latihan diluar pendidikan formal (Aiko, 2015).

Jepang menyediakan sekolah-sekolah khusus guru yaitu Sekolah Guru 2 Tahun atau *Syoto Sihan Gakko*, Sekolah Guru 4 Tahun atau *Guto Sihan Gakko*, dan Sekolah Guru 6 Tahun atau *Koto Sihan Gakko*. Selain memberikan pendidikan pada guru, Jepang juga memebrikan pelatihan kepada para guru agar terdapat keseragaman diantara mereka disemua jenis pendidikan. Jepang memberikan pengajaran kepada para guru tentang hal yang menyangkut Jepang, yaitu pembelajaran bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian Jepang, senam atau gerak badan (*Taiso*), latihan-latihan militer (*Kyoren*), pengajaran moral dan kewanitaan Jepang (khusus para guru wanita) (Aiko, 2015)

Dengan adanya sekolah guru dan juga pelatihan, Jepang berharap agar mereka para guru yang telah dilatih dapat menerapkan dan mengajar sesuai dengan apa yang telah diperoleh dan bisa menyampaikan apa yang telah diterapkan oleh kebijakan Jepang kepada para peserta didik, yaitu mengibarkan bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang "*Hinomura*" setiap pagi, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang, mengucapkan sumpah setia kepada cita-cita Indonesia yang terdapat dalam rangka Asia Raya (*Dai Toa*), senam (*Taiso*) setiap pagi, melakukan latihan fisik atau militer dan juga kerja bakti. Mereka juga mengharuskan bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar saat kegiatan belajar mengajar dan bahasa Jepang sebagai bahasa wajib (Abbas, 2018).

Dengan adanya perubahan pada sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, memberikan peluang bagi semua golongan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Pendidikan Islam juga mendapat perhatian dari Jepang saat itu. Beberapa kebijakan yang diberlakukan terkait pendidikan Islam antara lain, mengubah Kantor Islamistiche Zaken menjadi Sumubi yang dipimpin oleh K.H. Hasyim As'ari, pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan dari Jepang, diizinkan pembentukan barisan Hizbullah, diizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta dibawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Khar Muzakir dan Moh. Hatta, diizinkan pembentukan Pembela Tanah Air (PETA), dan terakhir diizinkan Majelis Islam A'al Indonesia (MIAI) untuk terus beroperasi meskipun akhirnya dibubarkan dan digantikan dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) yang terdiri dari Muhammadiyah dan Nadratul Ulama (NU) (Abbas, 2018).

Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945 setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tujuan dari pendidikan yang ingin memenangkan pertempuran membuahkan hasil akhir yang kurang memuaskan, membuat pendidikan di Indonesia sedikit mengalami kemerosotan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perubahan pada pendidikan dilakukan untuk menyesuaikan dengan landasan idiel Pancasila. Pembelajaran militer pada masa pendudukan Jepang telah memberikan bekal kepada para golongan muda untuk bisa mempertahankan kemerdekaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia (Hasan, 2017).

Kesimpulan

Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah. Jepang mengambil alih pendidikan di Indonesia dan mengubah sistem pendidikan di Indonesia secara signifikan. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia melarang semua sekolah bekas Belanda dan hanya memperbolehkan beroperasi sekolah-sekolah pribumi. Jepang memanfaatkan pendidikan untuk membantu kepentingan perang. Para peserta didik dilatih agar memiliki jiwa kemiliteran. Pendidikan moral Jepang ditanamkan pada peserta didik. Selain itu para guru juga dilatih agar bisa mengajar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jepang.

Daftar Rujukan

- Abbas, A. (2018). Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Jepang. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 64–69.
- Aiko, K. (2015). *Kuasa Jepang Di Jawa, Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- Amelia, F. (2020). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Bogor: Alprin.
- Apri Nuryanto, d. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran*, 13(2), 189–205.
- Hasan, S. H. (2017). *Perkembangan Kurikulum SMP (Dari Masa Hindia Belanda, Pendudukan Jepang kr Zaman Kemerdekaan)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Moehadi, K. S. (1997). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Permadi, E. G., & Purwaningsih, S. M. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(4), 590–603.
- Purwanti, N. (2018). pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 di Rembang. *Jurnal Noken*, 6(1), 77–94.
- Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, S. (2018). Propaganda Jepang dalam Melancarkan Kebijakan

- Pendidikan di Indonesia Tahun 1942-1945. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 6(1), 76–88.
- Saminto, S. S. (2019). Peran Pendidikan Di Masa Kependudukan Jepang (1942- 1945) Terhadap Perubahan Budaya Di Jawa Barat. *Jurnal Artefak*, 4(3), 13–18.
- Sedana, A. K. (2015). *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademik.
- Sri Wahyuni, L. A. (2018). Perkembangan Pendidikan Di Negara Jepang Pasca Perang Dunia II Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Candi*, 18(2), 97–109.
- Syahrudin, H. S. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Syarif, M. (2019). Politik pendidikan Jepang dan pengaruhnya terhadap pendidikan islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 7(3), 247–266.